

Faktor Domestik Penolakan Italia terhadap Pengungsi dari Afrika Utara tahun 2015-2019

Louis Harlianto Wicaksono

Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani
louisharlianto30@gmail.com

Muhammad Fauzan Alamari

Dosen Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani
m.fauzan@lecture.unjani.ac.id

Abstrak — *The wave of refugees that was initiated by the Arab Spring phenomenon has increased the number of refugee arrivals in Italy starting in 2015. Refugees from North Africa who use the Central Mediterranean Route to reach mainland Italy pose a new threat to the Italian government related to the refugee crisis that occurred. The anti-refugee stance formed by the Italian government which was implemented through the Closed Port Policy and the Salvini Decree-Law on Immigration is a policy that was formed after the victory of the right-wing party in Italy. Italy's repressive policies, which exclude international law from the 1951 Convention and the European Union's CEAS on the issue of refugees, become an interesting topic to study how the domestic level has a major influence on the rejection of refugees by the Italian government. In explaining how the role of the domestic level influences foreign policy, the author uses the concept of Neoclassical Realism by Gideon Rose which is supported through a qualitative method approach with data collection techniques in the form of literature studies. Based on the discussion and analysis, there are three points on how the domestic level plays a major role in the policy of rejecting refugees from North Africa. First, the use of the Put Italian First identity as a nationalist spirit generator by Salvini. Second, there is pressure from interest groups and parties to adopt their interests. Third, the anti-refugee factor of Salvini's leadership made the government exclude international law on refugees.*

Kata Kunci — **Domestic Factors, Threat Perception, Matteo Salvini, Domestic Politics.**

I. PENDAHULUAN

Fenomena krisis pengungsi yang dimulai pada abad ke-21 memunculkan ancaman baru bagi negara – negara Eropa yang menjadi tujuan utama para pengungsi yang berasal dari MENA (*Middle East and North African*). Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari mendapat lapangan pekerjaan, mendapat hak perlindungan, hingga mencari tempat tinggal yang aman. Menurut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), pengungsi diartikan sebagai individu yang mendapat perlakuan kekerasan, korban perang, persekusi, korban kejahatan di negaranya dan bergerak melintasi batas suatu negara yang jauh dari negara asalnya untuk mencari tempat tinggal yang aman di negara tujuan. Sebagai anggota dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), Italia telah meratifikasi konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memiliki kewajiban untuk melindungi dan memproteksi pengungsi berdasarkan mandat yaitu melindungi pengungsi karena alasan konflik, kekerasan yang berada di negara asalnya yang mengakibatkan perlunya perlindungan internasional baik dalam keadaan darurat maupun non-darurat, negara diharuskan melindungi hak internasional mereka (*Note on The Mandate of The High Commissioner for Refugees and His Office*, 2013).

Gelombang pengungsi yang terjadi diawali dengan

gejala konflik politik di negara-negara MENA. *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2011 dimana penduduk Tunisia yang bernama Mohamed Bouazizi (profesi sebagai penjual buah-buahan di Tunisia) membakar dirinya dengan tujuan sebagai aksi protes terhadap pemerintahan Presiden Ben Ali dan kondisi ekonomi di negaranya yang memburuk dan gerakan ini berkelanjutan di negara-negara Arab sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang otoriter, korupsi, dan kemiskinan yang menjalar ke negara-negara di MENA (*What Is the Arab Spring and How It Start?, 2020*).

Terjadinya peningkatan arus pengungsi dari negara asal ke negara tujuan yang terjadi pasca Arab Spring dikategorikan sebagai *mixed migration*, yakni perpindahan individu atau kelompok ke negara tujuan yang didorong akibat adanya distabilitas politik dan keamanan di Libya. Hal ini membuat negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, menjadi transit bagi pengungsi yang ingin menuju daratan Eropa. Sehingga negara-negara yang menjadi transit para pengungsi mulai mengkhawatirkan faktor keamanan perbatasannya akibat meningkatnya gelombang pengungsi menuju daratan Eropa. Peningkatan arus pengungsi yang tinggi akan berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi negara penerima. Dengan adanya potensi ancaman yang ditimbulkan, krisis pengungsi yang mayoritas berasal dari MENA mulai menjadi perhatian secara khusus bagi negara anggota Uni Eropa sebagai wilayah regional yang menerima pengungsi.

Dalam menanggapi permasalahan akibat gelombang pengungsi yang terjadi di Eropa, Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menjadi perwakilan tertinggi di Eropa membuat kebijakan untuk mengatasinya. CEAS atau *Common European Asylum System*, yang mengatur tentang pengungsi untuk mendapatkan hak-hak di negara tujuan harus mengikuti standart yang diterapkan. Standart yang digunakan pada CEAS berdasarkan *Dublin Regulation III* (Italia menjadi negara yang meratifikasi) yang menetapkan bahwa negara penerima pertama pengungsi yang datang ke Eropa wajib untuk memeriksa permohonan dokumen untuk diberikan perlindungan dan hak internasional pengungsi (*principle the first country of*

entry) (Sokolska, 2019). Mulai pada tahun 2015, negara-negara Eropa mulai kewalahan dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang berdatangan lewat laut Mediterania untuk mencapai tujuan daratan Eropa. Terdapat 1 juta pengungsi yang datang menuju Eropa melewati jalur laut, angka ini meningkat secara drastis dibandingkan pada tahun 2014 yang menyentuh angka 216.000 kedatangan (*Global Trends Forced Displacement in 2015, 2015*). Italia sebagai negara anggota dari Uni Eropa dan negara yang terletak pada jalur Laut Mediterania yang menjadi jalur lintas utama masuknya pengungsi melalui Laut Mediterania Tengah untuk mencapai negara-negara Eropa.

Pada dasarnya, Laut Mediterania memiliki tiga jalur utama migrasi yang meliputi, Laut Mediterania Tengah sebagai jalur akses dari Afrika Utara ke Italia, Laut Mediterania Timur yang menjadi akses jalur dari Turki ke Yunani, dan Laut Mediterania Barat yang menjadi akses dari Maroko ke Spanyol (Fiernaya, 2021). Rute melalui laut Mediterania menjadi akses utama bagi para pengungsi yang menuju daratan Eropa sebagai destinasi utama. Italia menjadi negara yang berbatasan dengan jalur yang digunakan pengungsi, sehingga keamanan di perbatasan menjadi perhatian utama bagi Italia menghadapi gelombang pengungsi yang terjadi. Krisis pengungsi yang terjadi pada rentang tahun 2015-2019, dimana total 500 ribu pengungsi yang masuk ke wilayah Italia melewati jalur Laut Mediterania kategori mayoritas 65% berasal dari negara-negara regional Afrika Utara (Tunisia, Nigeria, Libya) (*Migration to, from and in the Middle East and North Africa, 2016*). Peningkatan kedatangan pengungsi yang masuk ke Italia sepanjang tahun 2016 sebanyak 159.328 dengan mayoritas berasal dari negara-negara Afrika seperti Nigeria, Eritrea dan Sudan (Connor, 2016). Namun, memasuki tahun 2018, angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, dengan angka pengungsi yang datang berjumlah 23 ribu (*Mediterranean Migrant Arrivals Reach 106,269 in 2018; Deaths Reach 2,119, 2018*)

Dari angka pengungsi yang terdata masuk ke wilayah Italia, rute Laut Mediterania menjadi akses utama yang

digunakan ketika gelombang pengungsi yang terjadi dari tahun 2015- 2019. Wilayah yang menjadi akses utama masuknya pengungsi ke Italia yaitu Lampedusa dan Sisilia (Irawan, 2021). Gelombang pengungsi yang terjadi di Italia melahirkan sikap sentimen terhadap anti-pengungsi. Beberapa faktor diantaranya seperti ancaman terhadap sosial masyarakat Italia, lapangan pekerjaan dan hak sosial akan diambil oleh pengungsi, kejadian terorisme seperti Paris Attacks yang menjadi faktor timbulnya sikap anti-pengungsi yang berkembang di masyarakat Italia. Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2016 terhadap ketakutan masyarakat negara Uni Eropa pada krisis pengungsi yang terjadi, mengungkapkan 60% masyarakat Italia menyatakan ketakutan terhadap pengungsi karena dikaitkan dengan tindakan terorisme. Sedangkan 65% menyatakan bahwa pengungsi menjadi ancaman karena mengambil keuntungan lapangan pekerjaan dan hak sosial di Italia (Wike et al., 2016).

Pasca kemenangan partai sayap kanan *Five Star Movement (FSM)* tahun 2018, arah kebijakan Italia berubah menjadi anti-pengungsi. Matteo Salvini sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Italia yang menjadi aktor berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan Italia pada saat itu. Sikap anti-pengungsi Salvini sudah terlihat pada masa kampanye yakni kebijakan mendeportasi 500 ribu pengungsi yang berada di Italia ke negara asalnya dan mengungkapkan bahwa pengungsi yang beragama Islam merupakan ancaman nasional (Perrone, 2018). Hal tersebut dibuktikan ketika pada tahun 2018, Italia secara tegas menolak kapal Aquarius yang membawa 629 pengungsi. Kapal Aquarius yang membawa lebih dari 600 orang dengan mayoritas berasal dari Ghana, Nigeria, Sudan dengan 11 anak dibawah umur dan 7 perempuan yang sedang hamil didalamnya (*Italy's Matteo Salvini Shuts Ports to Migrant Rescue Ship*, 2018). Penolakan terhadap kapal yang berlabuh dengan membawa pengungsi dari wilayah Afrika Utara berdasarkan pada keputusan Salvini untuk mengantisipasi masuknya pengungsi ke Italia. Kebijakan untuk menutup gerbang Italia terhadap pengungsi yang datang.

Kebijakan Italia lainnya terhadap pengungsi yakni

memberikan larangan untuk berlabuh terhadap kapal organisasi NGO dari Jerman yaitu *Sea Watch* (Tondo, 2019). Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Italia tersebut, membuat pengungsi yang tidak memiliki akses untuk masuk terpaksa terlantar dan berharap untuk diselamatkan oleh negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini dilakukan pemerintah Italia sebagai pencegahan terhadap ancaman akibat masuknya pengungsi dari Afrika Utara di Italia. Dilihat dari berbagai kebijakan penolakan terhadap pengungsi yang dilakukan oleh Italia. Kebijakan yang dikeluarkan juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah Italia dalam mencegah ancaman yang ditimbulkan dari masuknya pengungsi ke Italia. Sikap yang dilakukan oleh Italia lewat kebijakan luar negerinya untuk menolak pengungsi datang dan masuk ke wilayahnya sebagai tindakan terhadap perlindungan keamanan nasional dan masyarakat Italia.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh dari level domestik terhadap kebijakan penolakan Italia terhadap pengungsi dari Afrika Utara tahun 2015-2019? Dalam menjawab pertanyaan yang ada didalam tulisan, artikel ini menggunakan teori Realisme Neoklasik untuk menjelaskan bagaimana level domestik dapat memiliki pengaruh penting dalam kebijakan luar negeri. Analisis pada tulisan ini akan menggambarkan dinamika domestik di Italia dalam waktu 2015-2019, yang dimana pada rentang waktu tersebut memperlihatkan adanya perubahan kebijakan pemerintah Italia terhadap pengungsi dari Afrika Utara. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dorongan dari domestik terhadap rezim pemerintah yang berkuasa dengan menggunakan isu pengungsi sebagai bagian dari upaya memperoleh keuntungan politik dalam menjamin keberlangsungan kepentingan elit politik yang dikemas melalui persepsi identitas nasional Matteo Salvini. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana peran level domestik dalam pembentukan kebijakan penolakan pemerintah Italia terhadap pengungsi dari Afrika Utara tahun 2015-2019

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting untuk mencari perbandingan dan menemukan pembahasan baru dalam penulisan artikel ini. Pada bagian ini, penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penulisan pada artikel ini, yang kemudian memuat ringkasan dan perbandingan perbedaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan.

Penelitian pertama, yang ditulis oleh Ahmad dengan judul “Analisa Kebijakan Hungaria dalam Menolak Pengungsi Asal Suriah pada Krisis Pengungsi Eropa 2015” yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini membahas tentang kebijakan luar negeri Hungaria dalam menolak pengungsi yang berasal dari Suriah pada krisis pengungsi di Eropa. Hungaria menjadi negara anggota Uni Eropa yang menolak imigran datang ke negaranya dan diimplementasikan pada kebijakan luar negeri. Fokus pada penelitian ini yaitu pembentukan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap pengungsi asal Suriah, dimana pasca krisis pengungsi di Eropa membuat presiden Hungaria yaitu Viktor Orban bersikap bahwa imigran merupakan ancaman terhadap keamanan dan sosial Hungaria. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep *Poliheuristic Theory* menurut Alex Mintz sebagai dasar untuk menjelaskan keterlibatan presiden Hungaria yaitu Viktor Orban dalam pembentukan kebijakan luar negeri Hungaria. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek negara yang menjadi penelitian dan konsep kebijakan luar negeri yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang akan dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri dipengaruhi pula oleh kebijakan domestik yang didorong oleh aktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan domestik suatu negara, sehingga kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri melainkan kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri saling mempengaruhi satu sama lain yang didasarkan pada identitas negara.

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Dea Olga Thenia, Arinto Nugroho, dan Elisabeth Septin Puspoayu dengan

judul “Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi Yang Terjadi di Italia” yang diterbitkan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab yang dilakukan pemerintah Italia atas penolakan terhadap pengungsi di Italia. Penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Italia dalam menolak pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Italia merupakan pelanggaran prinsip *refoulement* terhadap hukum internasional Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 karena Italia menjadi negara yang ikut meratifikasi hukum internasional tersebut. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teori dan konsep untuk menganalisis tindakan Italia terhadap penolakan imigran yang datang. Penelitian sebelumnya menggunakan hukum internasional untuk melihat sudut pandang akar permasalahan di penelitian ini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep realisme neoklasik yang dijelaskan dalam level domestik berperan penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Italia.

III. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami dan dirasakan oleh subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus (Moleong, 2007). Sehingga, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memahami fenomena level domestik dalam kebijakan penolakan pemerintah Italia terhadap pengungsi yang berasal dari Afrika Utara tahun 2015-2019.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan ini, yaitu Teknik studi pustaka (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan metode dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab

permasalahan pada penelitian ini dalam bentuk dokumentasi. Tidak terbatasnya ruang dan waktu membuat peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terjadi. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk meneliti dokumen yang akan mendukung dan berhubungan dengan objek pada penelitian ini dan mendukung terhadap data yang diperoleh oleh peneliti, dapat berupa buku, jurnal, laporan, website pemerintah, media informasi yang kredibilitas yang dapat diakses menggunakan internet.

Dalam mendukung analisis dalam penulisan ini, penulis menggunakan Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan di awal (Sugiyono, 2011). Tahapan metode penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif, dalam hal ini data akan diurutkan kedalam kategori dan urutan, sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lewat wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 2. Reduksi Data (*Data Reduction*): Mereduksi data atau memilah dan memilih data-data yang pokok saja yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, dapat mempermudah untuk memberikan gambaran terhadap fokus penelitian. 3. Penyajian Data (*Data Display*): Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan data berupa uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. 4. Verifikasi Data: Tahapan terakhir yaitu memverifikasi data secara empiris, sehingga dapat dibuktikan validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk membuktikan bahwa sumber data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengujian keabsahan data. metode pengujian keabsahan data akan digunakan untuk membuktikan bahwa data dan informasi yang didapat peneliti benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini juga membuat data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2020). Dalam menguji keabsahan data, diperlukan teknik urutan untuk menetapkan data yang akan digunakan pada penelitian ini, dengan menggunakan Bahan Referensi: yang dimaksud bahan referensi ialah pendukung untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh peneliti selama masa

penelitian. Referensi untuk mendukung bukti dapat berupa foto, rekaman video, rekaman suara pada waktu wawancara sehingga dapat mendukung kredibilitas data yang diperoleh peneliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Domestik di Italia

Kebijakan Penolakan yang dilakukan pemerintah Italia terhadap Pengungsi dari Afrika Utara merupakan kebijakan luar negeri Italia yang melanggar hukum internasional mengenai pengungsi. Merujuk pada konsep David Easton, dimana ada tiga tahapan dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang terdiri dari *input*, proses, dan *output* (Easton, 1953). Kebijakan penolakan pemerintah Italia merupakan bentuk *output* yang menjadi implementasi dari tekanan domestik yang ditujukan terhadap Pengungsi dari Afrika Utara. Kebijakan yang melanggar hukum internasional CEAS Uni Eropa dan Konvensi 1951 mengenai pengungsi, membuat penelitian ini akan berfokus pada sisi *input* yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Italia terhadap pengungsi. *Input* itu sendiri dapat diartikan sebagai tekanan domestik kepada elit politik untuk mewujudkan kepentingan kelompoknya.

Realisme Neoklasik karya Gideon Rose, menjabarkan faktor domestik berupa tekanan domestik, persepsi ancaman, kepercayaan ideologi, opini publik merupakan faktor yang paling mempengaruhi kebijakan luar negeri dibandingkan faktor eksternal (internasional). Pada dasarnya, kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari faktor perilaku domestik sebuah negara (Rose, 1998). Lebih lanjut, Rose membagi kebijakan luar negeri menjadi 2 klasifikasi, *innenpolitik* teori dimana perilaku negara dipengaruhi oleh politik domestik (karakter pemimpin, proses pembentukan kebijakan) dan struktural teori yang menjelaskan perilaku negara dipengaruhi oleh sistem internasional. Sehingga untuk melihat perilaku negara dapat dilihat dari dua sisi, baik dari sisi hubungan aktor dengan lingkungan eksternal dan juga hubungan aktor dengan politik domestik negaranya, karena kedua sisi ini akan berpengaruh pada kepentingan nasional terhadap posisi negara di lingkungan internasional. Maka, politik domestik dan politik luar negeri memiliki posisi yang

saling bergantung dan dapat menjadi efek domino satu sama lain (AS, 2018). Dengan demikian, aktor harus benar-benar mempertimbangkan kendala domestik (*domestic constraints*) pada negaranya yang terdiri dari 2 hal, yaitu faktor ideasional (*ideational factors*) dan faktor kelangsungan politik (*political survive*). Pada lingkup domestik, faktor kelangsungan politik berhubungan dengan persepsi kaum elit politik, ideologi, dan opini publik, apabila aktor tidak dapat mempertimbangkan kendala domestik akan dianggap sebagai kegagalan kepemimpinan aktor (Hadiwinata, 2017).

Adanya tekanan dalam domestik akan mempengaruhi kebijakan negara dibandingkan pemenuhan kepentingan negara di lingkup internasional (Rachmat, 2021). Tekanan dari kelompok kepentingan atau individu di Italia yang didominasi oleh partai sayap kanan, memainkan peran pada proses pembentukan kebijakan Italia menjadi anti-pengungsi yang diimplementasi lewat kebijakan penolakan Italia terhadap pengungsi dari Afrika Utara. Peneliti mengambil asumsi dari Fareed Zakaria yang menyatakan bahwa pernyataan dari elit politik negara mengenai kondisi domestik merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan, dimana asumsi ini memperkuat permasalahan di Italia bahwa tekanan dari kelompok kepentingan di domestik akan mempengaruhi negara untuk mengambil keputusan (Zakaria, 1992). Sehingga, kebijakan luar negeri paling baik dipahami sebagai dinamika domestik negara (Beqa, 2017).

Namun, diluar faktor domestik dan luar negeri, menurut Rosenau (1980) terdapat variabel individu sebagai decision-maker yang memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan kebijakan luar negeri (Rachmat, 2021). Karakteristik individu sebagai pengambil keputusan akan menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, hal ini dilihat pada penelitian ini yang membahas penolakan terhadap pengungsi di Italia yang kebijakan luar negeri tersebut berasal dari gagasan Matteo Salvini sebagai *decision-maker*. Kepentingan Salvini yang diimplementasikan lewat kebijakan luar negeri Italia lewat penolakan terhadap pengungsi yang datang, yang dimana faktor eskternal yaitu krisis pengungsi di Italia berpengaruh untuk membentuk sikap anti-pengungsi yang digunakan oleh Salvini untuk memutuskan kebijakan luar

negeri Italia. Dalam mendukung asumsi tersebut, peneliti mengambil asumsi dari teori *Elit Persuasion* menurut John Higley (2010), yaitu dimana individu atau kelompok yang memiliki jabatan strategis dapat mempengaruhi hasil politik. negara yang menggunakan semangat nasionalisme masyarakat di negaranya untuk mendukung kepentingannya (Debora & Sulaiman, 2019).

B. Kebijakan Penolakan Italia Terhadap Pengungsi dari Afrika Utara

Kebijakan penutupan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah Italia pada tahun 2018 diawali dengan terpilihnya partai sayap kanan pada pemilu di Italia yaitu *Five Star Movement (FSM)*. Kemenangan yang diraih partai FSM menjadikan Salvini sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri pada rezim pemerintahan Italia yang baru. Menindaklanjuti janji kampanye yang dilakukan partai sayap kanan untuk mengatasi secara tegas permasalahan pengungsi dan migran, pemerintah baru Italia mengeluarkan kebijakan 'penutupan pelabuhan' yang ditunjukkan terhadap kapal-kapal NGO. Mayoritas kapal-kapal NGO mengangkut pengungsi dan migran yang terdampar saat melakukan perjalanan menggunakan rute Mediterania sebagai 'operasi penyelamatan' terhadap kemanusiaan. Namun, itikad baik yang dilakukan oleh NGO dalam melaksanakan operasi penyelamatan, ditolak secara keras oleh pemerintah Italia untuk berlabuh. *Kapal Aquarius*, yang dioperasikan oleh *Médecins Sans Frontières (MSF)* dan *SOS Méditerranée* melaksanakan operasi penyelamatan dan pencarian terhadap pengungsi di perairan Mediterania dan area-area perairan yang digunakan oleh pengungsi untuk melakukan perjalanannya menuju Italia. Kapal tersebut mengangkut lebih dari 629 jiwa, namun mendapat penolakan untuk berhenti sejauh 35 mil di lepas laut selatan Italia (Pianigiani et al., 2018). Penolakan lainnya terjadi terhadap kapal *Lifeline* yang dioperasikan oleh NGO dari Jerman, mengangkut 234 pengungsi mayoritas berkewarganegaraan Afrika yang menyebabkan kapal tersebut terdampar di tengah Laut Mediterania selama 5 hari akibat penolakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah Italia dan Malta (*More Migrants in Limbo as*

Italy Blocks Lifeline Boat, 2018).

Tidak berhenti disitu, 1 tahun berjalannya pemerintahan sayap kanan Italia kembali menjatuhkan penolakan terhadap Kapal *Sea Watch 3* yang sedang melakukan operasi penyelamatan terhadap pengungsi dan migran di Laut Mediterania. Namun, pemerintah Italia menolak Kapal NGO tersebut untuk berlabuh yang membuat terdampar di tengah Laut selama 14 hari. Akan tetapi, kapten kapal yang bernama Carola Rackete mengabaikan perintah tersebut dan berlabuh di Lampedusa karena kondisi kapal yang tidak lagi bertahan dalam jangka panjang. Akibatnya, pemerintah Italia memberikan sanksi berupa denda 50 ribu euro sebagai pelanggaran keras terhadap kebijakan pemerintah Italia (Holroyd, 2019). Berlanjut ke kasus yang sama, yakni terjadi kepada Kapal *Open Arms* yang mengangkut 147 pengungsi secara terpaksa berlabuh di Lampedusa setelah dibiarkan terdampar di laut lepas selama 3 minggu akibat mendapat penolakan oleh pemerintah untuk berlabuh di wilayah Italia (Wires, 2019).

Kasus-kasus diatas menggambarkan konsistennya pemerintah Italia yang didominasi partai sayap kanan sejak awal kemenangannya bersikap anti-pengungsi. Kebijakan penutupan pelabuhan yang dikhususkan terhadap kapal-kapal yang mengangkut pengungsi membuat kuatnya wewenang yang dijalankan pemerintahan sayap kanan untuk memposisikan Italia sebagai negara yang anti terhadap pengungsi. Kebijakan tersebut secara tidak langsung melihat bagaimana pemerintah Italia yang berlawanan dengan hak kemanusiaan yang digambarkan melalui terdamparnya kapal-kapal yang mengangkut pengungsi. Implementasi dari janji-janji partai sayap kanan yang dipimpin Salvini pada saat kampanye salah satunya yaitu mendeportasi 500 ribu migran yang tidak memiliki dokumen (Kirchgaessner et al., 2018), yang diwujudkan secara nyata lewat kebijakan baru terhadap imigrasi Italia, "Ini merupakan pemerintahan era baru, dimana Salvini harus menunjukkan bahwa dia mewujudkan hal-hal yang dikampanyekan" (Harlan, 2018).

Perubahan sikap pemerintah Italia terhadap isu

pengungsi, dilihat sebagai perbedaan dengan rezim pemerintah yang terdahulu dan yang sedang berkuasa. Terpilihnya partai sayap kanan yang berlandaskan anti-pengungsi membuat kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah Italia berlawanan dengan kebijakan terdahulu akibat kepemimpinan Salvini sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri yang mengubah menjadi anti terhadap isu pengungsi di Italia. Kebijakan tersebut bertentangan dengan sikap Uni Eropa terhadap isu pengungsi. Hal tersebut juga menandakan bahwa lemahnya dasar yang menyatakan bahwa hukum Uni Eropa lebih tinggi dibandingkan dengan hukum nasional negara anggota. Selain kebijakan penutupan pelabuhan yang dilakukan pada masa pemerintahan rezim sayap kanan. Hal yang menjadi sikap bagaimana pemerintah Italia mendiskreditkan hak-hak pengungsi yang datang ke negaranya, yaitu 'Undang-Undang Salvini' atau dikenal dengan '*Salvini Decree Law on Immigration*'. Undang-Undang Imigrasi yang diusung oleh Menteri Dalam Negeri Italia yaitu Salvini, disetujui oleh Presiden dan Senat sebagai Undang-Undang yang mengatur Imigrasi dan Keamanan Italia pada September tahun 2018. Disetujuinya Undang-Undang Salvini, menimbulkan kontroversi terkait amandemen yang diusulkan. Amandemen ini menjadikan beberapa poin yang mengatur tentang status pengungsi dan pemohon suaka dihapuskan, perubahan yang diusung merupakan implementasi dari kepentingan Salvini.

Amandemen yang diusung dalam Undang-Undang Salvini, yaitu: 1. Penghapusan Perlindungan Kemanusiaan, 2. Penolakan dan Penarikan Hak Perlindungan Internasional, 3. Durasi Waktu Pemulangan di Pusat Repatriasi, 4. Penahanan Pemohon Suaka, 5. Penarikan Kewarganegaraan (CILD, 2018).

Disahkannya Undang-Undang Salvini oleh Senat Italia dan Presiden Sergio Mattarella, membuat pengungsi terancam untuk kehilangan hak internasionalnya. Amandemen yang diusung dengan meminimalkan hak-hak terhadap pengungsi dan wewenang NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan merasakan dampak yang begitu signifikan. Dan menjadi polemik bagi Uni Eropa dan beberapa negara anggota (Spanyol, Prancis, Jerman).

Kebijakan penutupan seluruh pelabuhan bagi pengungsi yang didukung lewat Undang-Undang Salvini menggambarkan sikap pemerintah Italia baru yang didominasi oleh partai sayap kanan dengan dasar anti-pengungsi. Oleh karena itu, sikap pemerintah Italia bertentangan dengan sikap Uni Eropa terhadap isu pengungsi yang berasal dari Afrika Utara yang diperlihatkan pemerintah Italia dengan mengabaikan hukum Uni Eropa yaitu CEAS. Hal tersebut menggambarkan bagaimana dominannya pemerintahan Italia baru yang memposisikan bahwa kepentingan nasional diatas hukum Uni Eropa lewat kebijakan *Closed Port Policy* dan *Salvini Decree Law*.

C. Tekanan dari Kelompok Kepentingan

Identitas masyarakat menjadi kepentingan yang perlu diperhatikan sebagai salah satu faktor terhadap pembentukan suatu kebijakan luar negeri. *“Put Italian First”* (Coman, 2018), slogan ini menjadi gambaran bagaimana pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat Italia. Lega dan M5S merupakan partai sayap kanan yang dominan di pemerintahan Italia, membuat isu identitas terutama akibat kedatangan pengungsi sebagai masalah utama bagi identitas Italia. Seperti di negara-negara lain, setiap partai politik, memiliki kelompok kepentingan dibelakangnya sebagai pemberi suara. Di Italia sendiri, kelompok-kelompok ini terbagi menjadi beberapa suara, ada yang memilih partai sayap kiri karena sesuai dengan identitas dan kepentingannya, ada pula yang memihak ke partai sayap kanan karena sesuai dengan identitas kepentingannya.

Tabel 4.1 PARTAI KOALISI DAN KELOMPOK PENDUKUNG DI ITALIA TAHUN 2018

	% of total	M5S	Lega	PD	Forza Italia	Left Parties	Fdi
Italian Cosmopolitans	12%	10%	3%	16%	3%	27%	1%
Catholic Humanitarians	16%	10%	2%	24%	25%	32%	8%
Disengaged Moderates	19%	24%	6%	27%	8%	28%	17%
Left Behind	17%	18%	29%	11%	21%	7%	15%
Security Concerned	12%	14%	17%	11%	20%	2%	18%
Cultural Defenders	17%	18%	24%	7%	8%	2%	36%
Hostile Nationalists	7%	7%	19%	5%	14%	2%	5%
Total	100%	101%	100%	101%	99%	100%	100%

Tabel menunjukkan segmen mana yang terdiri dari basis dukungan untuk setiap pengelompokan partai yaitu, Kosmopolitan Italia adalah 10 persen dari pendukung M5S, 3% pendukung Lega, dll. Karena kesalahan pembulatan beberapa total tidak mencapai 100% Dari tabel tersebut, koalisi partai Lega dan M5S mendapat dukungan besar dari kelompok *left behind*, *security concerned*, dan *cultural defenders*. Ketiga kelompok ini mengutamakan perlindungan identitas Italia sebagai faktor mengapa pemerintah Italia perlu mengevaluasi mengenai penerimaan pengungsi. Karena memiliki kesamaan mengenai pandangan mengenai isu pengungsi, ketiga kelompok ini mendukung koalisi partai sayap kanan yakni Lega dan M5S.

Kemenangan yang diraih partai sayap kanan, membuat pemerintah Italia diwarnai dengan sikap yang anti-pengungsi melalui pembentukan kebijakan terhadap isu pengungsi di Italia. Ditambah, kepentingan kelompok pendukung yang perlu diutamakan bersamaan dengan slogan mengutamakan identitas masyarakat Italia. Perlindungan terhadap identitas budaya merupakan salah satu faktor penting bagi *decision-maker* dalam membentuk politik luar negeri.

D. Persepsi Matteo Salvini terhadap Identitas Nasional

Penolakan yang dilakukan pemerintah Italia terhadap pengungsi dari Afrika Utara melalui *Closed Port Policy* dan

Salvini Decree Law, merupakan kebijakan yang ditekan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Matteo Salvini. Karena elit politik yang memiliki jabatan strategis, tentu Salvini memiliki power sebagai decision-maker. Sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Penekanan pada isu keamanan nasional, digunakan sebagai justifikasi bagi pengambil kebijakan, yang merupakan kesepakatan antara elit politik maupun kelompok kepentingan (Snyder, 1991). Hal tersebut dapat terlihat bagaimana sikap Salvini terhadap isu pengungsi, yang dimana Salvini merupakan ketua partai sayap kanan Lega. Partai sayap kanan di Eropa identik dengan sikap yang neo-nasionalisme, dan nativisme. Hal tersebut tercerminkan oleh Lega pimpinan Salvini yang menjadi ciri utama lewat slogan '*Italian First*'. Melalui slogan nasionalistik, menimbulkan sikap nativisme yakni anti-pengungsi.

Ini menjadi ciri khas bagi partai Lega, dimana pengungsi dan migran sebagai arti penting terhadap popularitas partai. Hal ini terlihat ketika Salvini menggunakan isu pengungsi untuk membangkitkan nasionalisme masyarakat Italia terhadap perlindungan identitas nasional negaranya. Penggunaan kata 'Kita' dan Mereka' menjadi representasi dari Salvini terhadap isu pengungsi di Italia.

Tabel 4.2 TABEL PENGGUNAAN KATA KITA DAN MEREKA

Item	Nouns	Adjectives	Verbs
Noun Phrases marking the "us" values (Italians)	The People; Italy; us; our homes; homeland	Honest; Good; Generous; Solidarity; Dignity and Pride	Struggle; pay taxes; have lost their jobs; have lost hope
Noun Phrases marking the "them" values (Migrants)	"Supposed Refugees"; them; criminals	Fake; Foreigners; Out of Control	Invade; Arrive (all in Italy); bring war; commit crime
Noun Phrases marking the "them" values (NGOs)	"Supposed Volunteers"; <i>scafisti</i> (migrant traffickers)	Fake; foreigners; out of control; criminal; exploiters; mafia	Exploit; commit crime; receive money (from unknown sources); are not Italian

Tabel diatas menunjukkan bagaimana isu pengungsi digunakan untuk justifikasi kebijakan penolakan terhadap pengungsi dan peran Salvini sebagai *decision-maker*. Mengkonstruksikan kata 'Kita' yang didukung lewat sikap

nativisme (slogan *Italian First*), menggambarkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan situasi domestik negaranya. Situasi domestik yang ditandai lewat permintaan politik dari kelompok kepentingan dengan justifikasi terancamnya identitas Katolik akibat kedatangan pengungsi yang membawa identitas dari negara asalnya. Pernyataan elit politik negara mengenai kondisi domestik merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri (Zakaria, 1992).

Penggunaan persepsi ancaman terhadap identitas menggambarkan bahwa isu pengungsi menjadi ancaman bagi Italia, yang ditandai dengan karakteristik Salvini sebagai 'Ayah' yang melindungi keluarganya (yaitu identitas Italia). Sehingga, untuk mengatasi ancaman dari isu pengungsi dari Afrika Utara, yaitu pemimpin yang mengurus negaranya sebagai 'Ayah' yang bertanggung jawab dan 'menutup Pintu' bagi orang asing (Cervi et al., 2020). Hal tersebut memiliki kesinambungan dengan konsep innenpolitik dimana perilaku negara dipengaruhi oleh karakter pemimpin yang diperlihatkan lewat kebijakan *Closed Port Policy* dan *Salvini Decree Law*.

E. Politik Domestik di Italia tahun 2018

Langkah nasionalisme yang digunakan Salvini dengan menggambarkan isu pengungsi sebagai masalah utama bagi identitas masyarakat Italia, mendapatkan respon positif berupa dukungan suara terhadap partai sayap kanan pada tahun 2018. Koalisi partai Lega dan M5S mendapat kenaikan pada pemilu tahun 2018, yang pada akhirnya kemenangan diraih partai sayap kanan dalam menjalankan pemerintahan Italia yang baru. Isu pengungsi menjadi sebuah dampak positif bagi kedua partai dengan membingkai pengungsi sebagai masalah utama dan sebuah ancaman terhadap identitas masyarakat Italia. Menggunakan ketakutan masyarakat Italia akibat isu pengungsi, lewat propaganda dengan menggambarkan antara nilai 'Kita' dan 'Mereka' untuk mendapatkan dukungan terhadap kepentingan partai. Hal ini menggambarkan bahwa individu atau kelompok yang memiliki jabatan strategis dapat mempengaruhi hasil

politik negara dengan menggunakan semangat nasionalisme masyarakat di negaranya untuk mendukung kepentingannya (Debora & Sulaiman, 2019).

Tabel 4.3 TABEL HASIL PEMILU DI ITALIA TAHUN 2018

	2013		2018	
	Chamber of Deputies	Senate	Chamber of Deputies	Senate
Anti-Migration Parties	6.05	6.25	21.70	21.87
Lega	4.09	4.33	17.35	17.61
FDI	1.96	1.92	4.35	4.26
PDF (Forza Italia)	21.56	22.30	14.00	14.43
M5S	25.56	23.79	32.68	32.22
Center-left	29.55	31.63	26.25	26.28
Turnout	75.19	72.93	75.11	72.99

Terpilihnya Salvini sebagai Menteri Dalam Negeri dan Wakil Perdana Menteri Italia, sebagai elit politik yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebijakan negara. Dengan menggunakan situasi domestik yang melihat isu pengungsi sebagai masalah utama bagi Italia, Salvini mendapat kepercayaan dari masyarakat Italia untuk membentuk kebijakan terhadap isu pengungsi di Italia. Hal ini merupakan faktor kelangsungan politik dimana persepsi kaum elit politik dan opini publik yang apabila tidak dapat mempertimbangkan situasi domestik akan dianggap kegagalan kepemimpinan aktor pembuat kebijakan (Hadiwinata, 2017). Sehingga, Salvini menekan pemerintah dengan menggunakan kondisi domestik sebagai hal yang terancam akibat isu pengungsi, yang tidak hanya sebatas pada dukungan politik pada pemilu tahun 2018, akan tetapi sebagai pembenaran terhadap tekanan Salvini kepada pemerintah melalui kebijakan *Closed Port Policy* dan *Salvini Decree Law*.

Sebagai elit politik yang memiliki pengaruh besar, sikap anti-pengungsi sebagai karakteristik Salvini dan partai sayap kanan, yang terlihat pada kebijakan imigrasi di Italia dipolitisasi ditandai dengan polarisasi isu dan sebagai ciri khas pemerintah Italia yang didominasi partai koalisi Lega dan M5S (Geddes & Pettrachin, 2020). Maka, tekanan domestik akan menentukan perilaku negara pada lingkup

internasional, yang terlihat pada disetujuinya peraturan Salvini oleh pemerintah Italia sebagai kebijakan luar negerinya, karena pada dasarnya kebijakan luar negeri paling baik dipahami sebagai domestic negara (Beqa, 2017).

Tekanan domestik menjadi tahapan awal yang menggunakan isu pengungsi sebagai ancaman untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengadopsi kepentingannya. Tahapan awal digambarkan dengan Salvini yang menggunakan pengungsi sebagai ancaman terhadap identitas nasional yang menjadi titik awal bagaimana sikap anti-pengungsi menyebar luas di masyarakat. Hal tersebut berkembang luas yang membuat partai sayap kanan di Italia memiliki ciri khas 'anti-pengungsi', sehingga terjadinya permintaan politik dari masyarakat terhadap isu pengungsi ini. Permintaan politik ini dicerminkan dengan beberapa kelompok kepentingan yang menyatakan isu pengungsi menjadi masalah utama bagi pemerintah Italia. Identitas Katolik yang melekat di masyarakat Italia, membuat isu pengungsi ini membawa identitas asing yang menjadi ancaman terhadap mereka. Sehingga, sikap anti-pengungsi dan anti-etnis minoritas berkembang luas di Italia, yang menunjukkan Italia sebagai negara tertinggi dengan anti-pengungsi dan anti-etnis minoritas di Eropa Barat (Diamant & Starr, 2018).

Tahapan awal yang digunakan Salvini dalam menggunakan persepsi isu pengungsi sebagai ancaman, berlanjut kedalam proses yang dimana tekanan domestik berperan dominan dibandingkan tekanan internasional. Tekanan domestik dari elit politik dan kelompok kepentingan yang beridentitaskan anti-pengungsi menekan pemerintah Italia untuk mengadopsi kepentingannya. Hal tersebut sebagai menjaga eksistensi rezim sayap kanan di pemerintah Italia dalam mewujudkan kepentingan kelompoknya dan permintaan politik yang diimplementasikan pada kebijakan pemerintah Italia terhadap penolakan pengungsi. Sehingga, pada output yang dihasilkan berupa kebijakan penolakan terhadap pengungsi dari Afrika Utara sebagai hasil akhir dari tahapan awal hingga proses yang dipengaruhi oleh faktor domestik.

Dalam konsep Realisme Neoklasik, dimana faktor domestik dipengaruhi oleh tekanan dari individu dan kelompok untuk mengadopsi kepentingannya yang diwujudkan pada kebijakan luar negeri, hal ini tepat apabila digambarkan dengan tekanan yang dilakukan Salvini sebagai seorang elit politik serta kelompok kepentingan pendukungnya yang memiliki sikap anti-pengungsi dan nasionalisme identitas menjadi prioritas utama terhadap pemerintah Italia untuk menyetujui kebijakan yang diusulkan Salvini. Tekanan yang diberikan Salvini dengan menggunakan semangat nasionalisme identitas berpengaruh besar terhadap pemerintah Italia, disatu sisi pemerintah Italia dirugikan dengan isu pengungsi yang terdapat dalam kepentingan nasionalnya. Sehingga, pilihan rasional akan dihadapkan pemerintah Italia untuk mengadopsi kepentingan Salvini beserta kelompoknya untuk memprioritaskan kepentingan utama masyarakat Italia melalui slogan "Italian First" yang menjadi ciri khas pemerintah Italia terhadap isu pengungsi. Hasil akhir konsep ini, yaitu kepentingan domestik berperan besar terhadap kebijakan luar negeri yang didasarkan pada tekanan elit politik dan kelompok kepentingan dengan menggunakan persepsi ancaman identitas untuk mendapat pembenaran terhadap kebijakan *Closed Port Policy* dan *Salvini Decree Law*.

V. KESIMPULAN

Gelombang Pengungsi menuju Italia menjadi sebuah isu keamanan yang digunakan oleh pemerintah Italia sebagai justifikasi terhadap kebijakan Penolakan terhadap pengungsi dari Afrika Utara. Faktor Domestik merupakan faktor utama dalam pembentukan kebijakan represif pemerintah Italia yang dimana kebijakan tersebut melanggar hukum internasional CEAS dan Konvensi 1951 mengenai pengungsi. Pertama, penggunaan identitas nasional melalui slogan 'Put Italian First' sebagai pembangkit semangat nasionalisme masyarakat Italia yang dihadapkan dalam ancaman identitas yang dibawa oleh para pengungsi dari Afrika Utara. Kedua, tekanan dari kelompok kepentingan dan kepentingan partai menjadi sebuah prioritas bagi Salvini untuk mengutamakan

kepentingan kelompoknya dengan menggunakan sentime anti-pengungsi dalam meraih kemenangan dalam pemilihan di Italia. Ideologi Fasisme serta identitas Katolik yang melekat di masyarakat Italia, digunakan sebagai legitimasi atas penolakan yang diusung oleh Salvini terhadap pengungsi dari Afrika Utara. Ketiga, faktor decision-maker Matteo Salvini yang digambarkan sebagai sosok 'Ayah' bagi masyarakat Italia untuk melindungi identitas nasional Italia dari ancaman isu pengungsi. Penggunaan kata 'Kita' dan 'Mereka' menjadi sebuah representatif bahwa isu pengungsi digunakan Salvini untuk menjustifikasi kebijakan represif terhadap pengungsi.

Tekanan politik domestik yang memberikan pengaruh utama dalam kebijakan penolakan Italia terhadap pengungsi, menjadi sebuah polemik bagi pemerintah Italia untuk mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan hukum internasional. Ketidacacuan pemerintah Italia untuk tunduk terhadap Konvensi 1951 dan CEAS Uni Eropa merupakan sebuah gambaran bagaimana faktor domestik menjadi peran utama dalam memainkan kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah dinamika politik yang terjadi di domestik dapat digunakan oleh elit politik melalui persepsi ancaman suatu isu tertentu sebagai kekuatan utama dalam menjustifikasi kebijakan represif yang dibuatnya.

REFERENSI

- AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(04), 1–9.
- Beqa, M. (2017). Neoclassical Realism: Its Promises and Limits as a Theory of Foreign Policy. *European Academic Research*, 05(01), 316–330.
- Cervi, L., Tejedor, S., & Dornelles, M. A. (2020). When Populist Govern the Country: Strategies of Legitimization of Anti-Immigration Policies in Salvini's Italy. *Sustainability*, 12(23).
- CILD. (2018, September 25). *The Salvini Decree Has Been Approved: Legislative Changes on Immigration*. Italian Coalition for Civil Liberties and Rights. [https://cild.eu/en/2018/09/25/the-salvini-decree-has-been-approved-legislative-changes-](https://cild.eu/en/2018/09/25/the-salvini-decree-has-been-approved-legislative-changes)

on-immigration/

- Coman, J. (2018, December 1). *'Italian First': How the Populist Right Became Italy's Dominant Force*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/01/italians-first-matteo-salvini-the-league-rise-rightwing-populis>
- Connor, P. (2016, November 2). *Italy on Track to surpass Greece in refugee arrival in 2016*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/02/italy-on-track-to-surpass-greece-in-refugee-arrivals-for-2016/>
- Debora, C., & Sulaiman, Y. (2019). Pengaruh Elit Politik Indonesia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kelompok Elit Radikal Islam Melalui Isu Palestina. *Jurnal Academia Praja*, 02(02).
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State Political Science*. Alfred A Knopf.
- Fiernaya, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Italia Terhadap Imigran. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 8(1), 1–15.
- Global Trends Forced Displacement in 2015*. (2015). UNHCR The UN Refugee Agency. <https://www.unhcr.org/576408cd7.pdf>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harlan, C. (2018, June 11). *Italy's New Government Sends Immigration Message by Rejecting Rescue Ship*. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/europe/italys-new-government-sends-immigration-message-by-rejecting-rescue-ship/2018/06/11/f213dafc-699a-11e8-a335-c4503d041eaf_story.html
- Holroyd, M. (2019, June 27). *Why Did Sea-Watch 3 Decide to Enter Italian Territorial Waters?* Euronews. <https://www.euronews.com/my-europe/2019/06/26/why-did-sea-watch-3-decide-to-enter-italian-territorial-waters>
- Irawan, M. E. M. (2021). *Analisa Upaya Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode 2014-2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Italy's Matteo Salvini Shuts Ports to Migrant Rescue Ship*. (2018, June 11). BBC. <https://www.bbc.com/news/world-europe-44432056>.
- Kirchgaessner, S., Tondo, L., & Rankin, J. (2018, June 1). *Italy Vows to 'Send Home' Undocumented Immigrants*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/01/italy-vows-to-send-home-undocumented-immigrants>
- Mediterranean Migrant Arrivals Reach 106,269 in 2018; Deaths Reach 2,119*. (2018, November 27). IOM UN Migration. <https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-106269-2018-deaths-reach-2119>
- Migration to, from and in the Middle East and North Africa*. (2016, August). International Organization for Migration. https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/2018-07/Migration-in-the-Middle-East-and-North-Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [20] *More Migrants in Limbo as Italy Blocks Lifeline Boat*. (2018, June 25). Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2018/6/25/more-migrants-in-limbo-as-italy-blocks-lifeline-boat>
- Note on The Mandate of The High Commissioner for Refugees and His Office*. (2013, October). UNHCR The UN Refugee Agency. <https://www.unhcr.org/protection/basic/526a22cb6/mandate-high-commissioner-refugees-office.html>
- Perrone, A. (2018, June 25). *Who is Matteo Salvini, Italy's new radical interior minister?* Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2018/6/25/who-is-matteo-salvini-italys-new-radical-interior-minister>
- Pianigiani, G., Horowitz, J., & Minder, R. (2018, June 11). *Italy's New Populist Government Turns Away Ship With 600 Migrants Aboard*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2018/06/11/world/europe/italy-migrant-boat-aquarius.html>
- Rachmat, A. N. (2021). Faktor Domestik Kebijakan Pemerintah Hungaria Dalam Menangani Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah Periode Tahun 2015-2019. *Jurnal Academia Praja*, 04(01), 23–41.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(01), 144–172.
- Snyder, J. (1991). *Myth of Empire: Domestic Politics and International Ambition*. Cornell University Press.
- Sokolska, I. (2019). *Common European Asylum System: achievements during the legislative term 2014-2019*. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608877/IPOL_BRI\(2019\)608877_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608877/IPOL_BRI(2019)608877_EN.pdf)
- Sugiyono. (2011). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

[30] Tondo, L. (2019, June 26). *Migrant Rescue Ship Defies Salvini's ban to enter Italian Port*. The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2019/jun/26/ngo-boat-carrying-migrants-defies-matteo-salvini-veto-lampedusa-italy>

What is the Arab Spring, and how did it start? (2020). Aljazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start>

Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016, July 11). *Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs*. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/>

Wires, N. (2019, August 20). *Stranded Migrant Rescue Ship Open Arms Refuses to Leave Italian Waters*. France24.
<https://www.france24.com/en/20190820-italy-spain-migrant-rescue-ship-open-arms-matteo-salvini-lampedusa>

Zakaria, F. (1992). Realism and domestic Politics: A Review Essay. *International Security*, 17(01), 177–198.